

Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan Gender

Imam Samroni¹

LATAR BELAKANG

Makalah ini berupaya menyigi relasi agama dan penguatan gender, terutama persepsi sikap keagamaan tentang keadilan dan kesetaraan gender. Untuk itu, peserta Musyawarah dapat langsung memerhatikan paparan data pada halaman 6-10. Sumber data terutama merujuk hasil program “Penguatan pemahaman dan sikap keagamaan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam keluarga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,” Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Cordaid. Mitra program adalah tokoh dan ormas keagamaan; pejabat Kantor Urusan Agama; Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama; akademisi dan pusat-pusat studi wanita; aktivis gender dan ormas perempuan; korban (*survivor*) kekerasan rumah tangga; dan jaringan kerja di lima kabupaten/kota. Agama-agama dalam hal ini adalah (alfabetis): Buddha, Hindu, Islam, Katolik, dan Protestan. Pada saat usulan disusun, agama Konghucu belum dimasukkan dalam program. Untuk tahun 2006-2007 dikonsentrasikan pada program riset, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Pertama, diskusi terbatas “Penguatan pemahaman dan sikap keagamaan yang adil gender dalam keluarga,” dengan narasumber:

1. Wilis Rengganiasih E.E., *Perspektif Buddhis tentang Pemahaman dan Sikap Adil Gender dalam Keluarga*, 8 September 2006.
2. Ida Bagus Agung, *Gender dan Swadharma Warga Rumah Tangga dalam Perspektif Agama Hindu*, 8 September 2006.
3. Trias Setiawati, *Pemahaman dan Sikap Adil Gender dalam Keluarga*, 7 September 2006.
4. Bertholomeus Bolong, OCD, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga (Pandangan Gereja Katolik)*, 9 September 2006.
5. Pdt. Bambang Subagyo, S.Th., *Sikap dalam Mewujudkan Kemitrasejajaran Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga*, 5 September 2006.

Diskusi ini merupakan afirmasi dari buku referensi yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2004, yaitu:

- (1) *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Buddha*, dengan tim penyusun Bhikuni Virya Guna, Pdt. Abhayahema Kaharuddin, dan Tristina Suhadi.
- (2) *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Hindu*, dengan tim penyusun I Ketut Bantas, dkk.

¹ Makalah disampaikan pada Musyawarah “Pembentukan Forum Pengarusutamaan Gender bagi Ormas Agama,” Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY. Yogyakarta, 26 Juni 2007. Pemakalah adalah peneliti Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Email: imamsamroni@gmail.com

- (3) *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perpektif Agama Islam*, dengan tim penyusun Noryamin Aini, dkk.
- (4) *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perpektif Agama Katolik*, dengan tim penyusun Sr. Vincentya HK, dkk.
- (5) *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perpektif Agama Protestan*, dengan tim penyusun Pdt. Rosmalia L. Barus, Nancy, dkk.

Kedua, Seminar, 20 September 2006, dengan agenda:

1. *Konstruksi Pemahaman Agama dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, oleh Drs. Yusdani, M.Ag. dan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution.
2. *Testimoni Korban (Survivor) KDRT*, dengan pendampingan dari Rifka Annisa.
3. *Diskusi UU PKDRT: Kebijakan dan Penerapan*, dengan fasilitator Imam Samroni, S.Pd. dan M. Roem Sybly, S.Ag.

Ketiga, Riset Lapangan “Sikap keagamaan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam keluarga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.”²

Konteks riset kuantitatif ini adalah sikap-perhatian terhadap kondisi-kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga, pembangunan dan pemberdayaan gender, serta relasi antar-agama, gender, dan pembangunan. “Sikap keagamaan” adalah keadaan internal manusia berdasar pemahaman hasil asimilasi pengetahuan dalam ajaran agama. Sedangkan “keadilan dan berkesetaraan gender” dipahami sebagai capaian kinerja pembangunan dan pemberdayaan gender yang mampu memperkuat sikap keagamaan yang adil dan setara gender dalam keluarga.

Periset menegaskan truisme, doktrin agama-agama yang dinyatakan dalam Teks Suci adalah adil dan setara gender. Namun ketika sudah berada pada wilayah pemahaman dan penyikapan, yaitu hasil interaksi antara umat beragama dengan teks suci, kadang ajaran itu terdistorsi. Hal ini terutama disebabkan pola pikir patriarki yang telah mengakar kuat dan dinyatakan sebagai sikap keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga secara negatif.

Riset ini bersifat deskriptif-eksploratif, dengan pengumpulan data melalui angket. Riset mengacu pada pengukuran *makna kata (semantik)* atau *teknik beda semantik* menurut Osgood, Suci, dan Tannenbaum. Pasangan kata sifat yang dipilih adalah: *sulit-mudah, berat-ringan, pasti-tidak pasti, baik-buruk, pantas-tidak pantas, kuat-lemah, menyenangkan-tidak menyenangkan, aman-berbahaya, terpuji-terhina, bebas-ketat, dan besar-kecil*. Angket terdiri 23 indikator yang disigi menjadi 40 pertanyaan (P₁-P₄₀). Sedangkan responden dikenali dengan 9 identitas yang dirinci menjadi 58 atribut identitas, yaitu Agama (5); Jenis kelamin atau Gender (2); Tempat tinggal (5); Kewargaan (3); Umur (4); Status pernikahan (3); Kedudukan/status dalam keluarga (6); Pendidikan terakhir (9); Profesi (20).

² Tim Periset PSI UII terdiri Drs. Yusdani, M.Ag. (Koordinator), Drs. Aden Wijdan SZ, M.Si., Edi Safitri, S.Ag., M.S.I., Imam Samroni, S.Pd., M. Latif Fauzi, S.Ag., M.S.I., M. Roem Sybly, S.Ag., Dra.Rahmani Timorita Y, , M.Ag., Ulfa Jamilatul Farida, S.I.P.

Tabel 1. Jumlah penduduk se-Kabupaten/Kota di Propinsi DIY berdasar agama

Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Lain	Jumlah
Yogyakarta	402.602	37.958	63.008	2.133	3.218	227	509.146
Bantul	768.511	11.996	23.192	837	618	12	805.166
Kulonprogo	420.408	5.720	21.382	7	670	-	448.187
Gunungkidul	719.152	14.792	16.659	1.962	443	-	753.008
Sleman	808.154	27.834	59.244	1.025	551	868	897.676
Propinsi DIY	3.118.827	98.300	183.485	5.964	5.500	1.107	3.413.183

Sumber: BPS DIY 2005 dan Kanwil Depag DIY 2006. Data diolah.

Tabel 2. Persentase jumlah penduduk se-Kabupaten/Kota di Propinsi DIY berdasar agama

No	Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lain	Jumlah
1	Yogyakarta	79.07	7.46	12.38	0.42	0.63	0.04	100.00
2	Bantul	95.45	1.49	2.88	0.10	0.08	0.00	100.00
3	Kulonprogo	93.80	1.28	4.77	0.00	0.15	0.00	100.00
4	Gunungkidul	95.50	1.96	2.21	0.26	0.06	0.00	100.00
5	Sleman	90.03	3.10	6.60	0.11	0.06	0.10	100.00
	Propinsi DIY	91.38	2.88	5.38	0.17	0.16	0.03	100.00

Melihat data jumlah penduduk di atas, terdapat selisih jumlah penduduk antar agama yang sangat jauh. Misalnya jumlah penduduk beragama Islam di DIY sebesar 91,38 %, sedangkan Katolik 5,38 %, atau Budha sebesar 0,16 %. Perbedaan jumlah yang sangat jauh ini tidak memungkinkan periset untuk memakai satu metode yang sama diberlakukan untuk masing-masing agama. Secara umum, pengambilan sampel memakai metode *accident random sampling*, yang secara khusus dirasionalisasi:

1. Jumlah umat beragama yang jumlahnya lebih dari 20 % dari penduduk DIY, sampel langsung ditentukan sejumlah 1000 responden.
2. Jumlah umat beragama yang jumlahnya lebih dari 2 % dari penduduk DIY secara keseluruhan, sampel diambil sebesar 0,2 %
3. Jumlah umat beragama yang jumlahnya kurang dari 2% dari penduduk DIY secara keseluruhan, sampel diambil sebesar 0,5 %

Sampel responden adalah: (1) Islam: 1000 responden, (2) Katolik: 367 responden, (3) Protestan: 197 responden, (4) Hindu: 30 responden, dan (5) Buddha: 28 responden. Jadi jumlah responden penelitian ini adalah 1621 orang, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 3. Sebaran responden penelitian berdasar area geografis dan agama

No	Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	Yogyakarta	129	76	126	11	16	358
2	Bantul	246	24	46	4	3	324
3	Kulonprogo	135	11	43	0	3	192
4	Gunungkidul	231	30	33	10	2	306
5	Sleman	259	56	118	5	3	441
	Propinsi DIY	1000	197	367	30	28	1621

Dalam perkembangannya, jumlah responden ditambah setelah mempertimbangkan kemungkinan angket rusak dan memerhitungkan tingkat kepercayaan secara proporsional, dengan keterangan:

1. Penyebaran angket : 21 Desember 2006 – 26 Januari 2007
2. Jumlah angket disebar : 2.405
3. Jumlah angket rusak : 394 (16,38%)
4. Jumlah angket diolah : 2.011 (83,62%)
5. Pengolahan data : per 15 Januari 2007

Keempat, Kelompok Diskusi Terbatas (*Focus Group Discussion*) tentang riset “Sikap keagamaan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam keluarga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,” 7, 14, 21, 28 Februari 2007.

Kelima, Workshop Hasil Riset “Sikap keagamaan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam keluarga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,” 11 April 2007, dengan agenda:

1. *Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan Gender Dalam Keluarga di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*, oleh tim periset PSI UII.
2. *Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Propinsi DIY: Capaian Program dan Evaluasi Kinerja*, oleh Hj. Dra. Triastuti Haryanti, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan DIY.
3. *Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Propinsi DIY: Suara Masyarakat, Politik Pengarusutamaan, dan Skema Penerapannya*, oleh Hj. Ida Fatimah Z.A., Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY.

Sidang-sidang Komisi, dengan agenda:

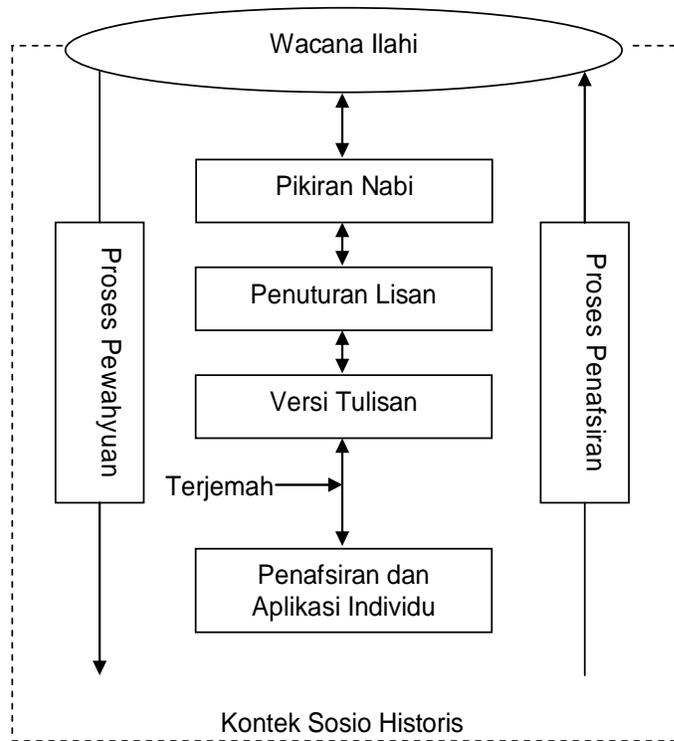
1. Evaluasi Program dan Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Propinsi DIY
2. Rekomendasi untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Propinsi DIY

Keenam, Ritret Hasil Riset, 15-16 Mei 2007, yang mengagendakan evaluasi program riset, rekomendasi program tahun kedua, dan penyiapan evaluasi pasca-program

Desain Program

Desain program ini menegaskan relasi keagamaan dengan gender pada argumentasi sejarah dan heurmenetik, yaitu untuk meriset bagaimana pemeluk agama bersikap mengenai gender. Argumentasi sejarah dipakai untuk mengungkap karakter politik tekstual dan seksual yang berkembang di masyarakat, terutama proses yang telah menghasilkan penafsiran agama yang berkecenderungan (sikap) patriarkis. Sedangkan argumentasi heurmenetik dimaksudkan untuk menemukan apa yang disebut sebagai epistemologi egalitarianisme --nalar yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan-- di dalam agama, sebagaimana gambar berikut.

Gambar. Skema epistemologi egalitarianisme



Sebagai sabda Tuhan, Kitab Suci tidak bisa ditiru, diubah, dipalsukan, dan digugat. Namun, keadaan itu tidak berlaku bagi pemahaman manusia tentangnya. Hal ini merupakan dasar-dasar "wahyu Tuhan dan perwujudan duniawinya." Gambar di atas memperlihatkan alur pemahaman hubungan tersebut. Pembacaan muncul dari doktrin ketidakterciptanya wahyu Tuhan, yang tidak saja mengakui keterbatasan pemahaman manusia, tetapi juga menegaskan karakteristik imperatif dari Tulisan yang Disucikan.

Pembedaan tersebut memunculkan kemungkinan bahwa penafsiran firman Tuhan berarti menyesuaikan pesan (Tuhan) dalam berbagai tingkatan. Teks-teks Tuhan memang bersifat kekal, tetapi kreativitas penafsiran manusia tidak ada batasnya. Proses penafsiran ini bersifat tidak akurat dan tidak lengkap, yang membuka ruang untuk dikritik dan menyejarah, dan bukan wahyu Teks Suci itu sendiri.³

³ Asma Barlas (2005), *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Terj. R. Cecep Lukman. Jakarta: Serambi, hal. 88-90. Walaupun Barlas menjelaskan persoalan tersebut dalam perspektif Islam, namun berdasar hasil diskusi, teorinya dapat digunakan untuk mengkaji agama-agama di Indonesia.

SIKAP KEAGAMAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKESETARAAN GENDER

Berdasarkan analisis data terhadap seluruh angket, maka dapat dideskripsikan sikap keagamaan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam keluarga di wilayah DIY. Berdasarkan identitas kelima agama responden, terdapat kecenderungan sikap yang sama pada 14 indikator berikut:

1. Perempuan sebagai ibu rumah tangga, dengan kecenderungan sikap *stereotype*, yaitu suatu hal yang **sulit** dan **berat**.
2. Perempuan menjadi gubernur, dengan kecenderungan sikap *tidak subordinat*, yaitu suatu hal yang **pantas** dan **kuat**.
3. Tetap berusaha mempunyai anak laki-laki dalam keluarga, dengan kecenderungan sikap *subordinat*, yaitu suatu hal yang **baik**.
4. Anak perempuan mendapat warisan setengah dari anak laki-laki, dengan kecenderungan sikap *tidak marginal*, yaitu suatu hal yang **buruk** dan **tidak pantas**.
5. Pendidikan anak laki-laki lebih penting daripada pendidikan anak perempuan, dengan kecenderungan sikap *tidak marginal*, yaitu **tidak pantas**.
6. Poligami, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **buruk**, **berat**, dan **tidak menyenangkan**.
7. Kawin siri, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **buruk** dan **berbahaya**.
8. Melaporkan praktek kekerasan dalam keluarga tetangga kepada pihak berwajib, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **baik** dan **terpuji**.
9. Pergunjangan di televisi, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **buruk** dan **berat**.
10. Membeli media yang bergambar porno, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **tidak pasti** dan **tidak pantas**.
11. Sekelompok masyarakat membakar tempat pelacuran, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **buruk** dan **terhina**.
12. Bapak/Suami sebagai pengambil keputusan di dalam keluarga, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **kuat**.
13. Kondisi agamis dalam keluarga, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **mantap** dan **terpuji**.
14. Bapak/Suami bersikap adil di dalam keluarga, dengan kecenderungan sikap *menolak tindakan kekerasan*, yaitu suatu hal yang **mantap** dan **terpuji**.

Sebaliknya, terdapat kecenderungan sikap yang berbeda pada kelima agama pada 9 indikator berikut:

1. Kecantikan/Ketampanan adalah modal sukses.
2. Perempuan tidak menikah.
3. Membedakan permainan untuk anak laki-laki dan perempuan.
4. Uang jajan anak perempuan sama dengan anak laki-laki.
5. Kebijakan pengupahan karyawan yang menikah dengan standar lajang, karena mendapat nafkah suami.
6. Istri menjadi kepala rumah tangga.
7. Perkawinan beda agama.

8. Orangtua mendampingi anak menonton televisi.
9. Anggaran publik (APBN/APBD) berpihak terhadap laki-laki dan perempuan.

Membaca data

Bacaan 1. Orang tua mendampingi anak menonton televisi

Meskipun terdapat kecenderungan sikap yang berbeda pada indikator tersebut, prosentasi terbesar adalah sikap yang **ketat** dan **pasti**, sehingga jika orang tua tidak mendampingi anak menonton televisi adalah *tindakan kekerasan*.

Tabel 4. Prosentasi orangtua mendampingi anak menonton televisi

Agama	Prosentasi (%)	Populasi se-DIY
Buddha	32.0	5.500
Hindu	46.8	5.964
Islam	48.6	3.118.827
Katolik	40.8	183.485
Protestan	47.3	98.300

Studi media, terutama tentang teve, mengalami pertumbuhan yang pesat akhir-akhir ini. Posisi anak sebagai penonton televisi --baik program sinetron, kuis, *variety show*, *infotainment*, *reality show*, juga iklan-- dalam konteks pembelajaran informal, senyatanya membutuhkan pendampingan orangtua. TV sebagai industri padat modal merupakan media yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apapun, termasuk sebagai sumber belajar. Permasalahannya adalah ketika materi pendidikan tidak pernah mendapat rating yang bagus, sementara pihak pengelola mendaulat sistem rating sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan tayangan, apalagi untuk jam tayang-utama.⁴

Menurut UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Masa itu dianggap sebagai masa di mana seseorang sedang dalam proses membentuk identitas dirinya yang sarat dengan imitasi atau peniruan-peniruan yang mereka pelajari dari lingkungannya, sebagaimana yang dipersepsi. Ketika anak meniru tayangan SmackDown⁵ dan

⁴ Untuk membaca rating (*ratings literacy*) lihat: Pembodohan massal ala media elektronik, dalam *mailing list* indo-marxist@yahoo.com, Sat, 10 Sep 2005, diunduh 12 Sep 2005; Effendi Gazali (2006), *Media Televisi: Puasa, Rating, dan Matinya Akal Sehat*, *Kompas*, 29 September; *Kompas* (2007), *Presiden Minta KPI Awasi Teve*, 4 Mei; *Kompas* (2007), *Penyiaran: Sistem "Rating" Berpotensi Bodohi Pemirsa Televisi*, 8 Juni; *Kedaulatan Rakyat* (2007), *'Rating' Televisi Potensial Bodohi Masyarakat*, *Universitaria*, 12 Juni

⁵ SmackDown (gulat Amerika), RAW, dan ECW merupakan produk World Wrestling Entertainment atau WWE Inc., perusahaan yang bermarkas di Stamford, Connecticut, AS. Pertama kali ditayangkan 29 April 1999 langsung mendapat jam tayang *primetime*, dan menyebar ke Inggris, Irlandia, Australia, Cile, Filipina, dan Pakistan. Di Indonesia SmackDown ditayangkan di RCTI (per 2000), TPI, dan Lativi, yang semuanya menuai protes. Pendapatan WWE dari program ini untuk Mei 2005-April 2006 mencapai 400 juta dollar AS, dengan keuntungan bersih sekitar 47 juta dollar AS. WWE juga terdaftar dalam bursa efek dunia. Lihat *Kompas*

menimbulkan korban, masyarakat menyoal peran orangtua yang tidak mendampingi anak di depan teve.

PSI UII mengapresiasi dalam konteks kebijakan jam belajar masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi DIY No. 93 Tahun 2003 tentang Jam Belajar Masyarakat. Kebijakan yang sudah menjadi ikon Jogja sebagai kota pendidikan serta menjadi inspirasi propinsi dan negara lain ini niscaya dikelola sebagai aturan-main masyarakat yang pro-keluarga⁶.

Bacaan 2. Membeli media yang bergambar porno

Kecenderungan sikap responden dari seluruh identitas agama adalah menolak, yaitu **tidak pasti** dan **tidak pantas**, sehingga membelinya sebagai *tindakan kekerasan*.

Tabel 4. Prosentasi membeli media yang bergambar porno

Agama	Prosentasi (%)	Populasi se-DIY
Buddha	68.0	5.500
Hindu	80.9	5.964
Islam	83.3	3.118.827
Katolik	76.1	183.485
Protestan	88.2	98.300

Prosentasi di atas niscaya disikapi dengan arif, terutama *vis a vis* dengan pergerakan bisnis media porno (*human pleasure sexual machine*). Sebagai ilustrasi, dalam kasus pembelian domain porn.com seharga lebih dari US\$ 9,5 juta atau sekitar Rp 83,83 miliar (US\$1 = Rp 8.825) atau sex.com yang terjual US\$ 12 juta atau sekitar Rp 105 miliar⁷. “Memerangi” bisnis besar sejak abad ke-16 di media elektronik sudah menjadi agenda sejumlah lembaga. Pasalnya, pornografi melanggar hak-hak privasi tubuh manusia (perempuan dan lelaki) melalui sarana teknik audio-visual dan mengobjekkan. Tulisan dan gambar porno (*graphie-graphè*) mendatangkan kekerasan, tindak kriminal, konflik antarpribadi dan antargolongan. Bisnis ini sering diperkuat dengan even *offline*, misalnya, AVN Adult Entertainment

(2006), Asal Usul Gulat “Smack Down”, Mesin Pencetak Uang WWE, 29 November

⁶ Lihat juga Moch. Arief Fathoni (2007), Apa Kabar Gerakan Belajar Masyarakat, 13 Mei, dalam www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&dn=20070513093044, data diunduh 16 Juni 2007. Dalam kasus Banjar, Kalimantan Selatan terdapat usulan untuk mengembangkan Jam Belajar Masyarakat-nya Jogja menjadi Jam Belajar Keluarga. Lihat Gusti Marhusin (2004), Rumahku Sekolahku (Catatan Muhibah Untuk Taufik Arbain dan Ahmadi Hasan), dalam www.freelists.org/archives/ppi/04-2004/msg00100.html, di-posting 6 April pukul 11:28:51 +0200, data diunduh 16 Juni 2007.

⁷ Banyak Peminat, Porn.com Laris Rp 83,8 M, dalam <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/31/time/104-244/idnews/787656/idkanal/398>, 31/05/2007 10:42 WIB, data diunduh 16 Juni 2007.

Expo 2007 yang berlangsung di Las Vegas, 10-13 Januari 2007, yang diikuti 340 perusahaan dengan menghadirkan 250 bintang porno.⁸

Menurut statistik di TopTenReviews, Indonesia menempati posisi 10 besar dunia untuk negara dengan pencarian kata kunci 'sex' terbanyak, dengan urutan Pakistan, India, Mesir, Turki, Algeria, Maroko, Indonesia, Vietnam, Iran, dan Kroasia. Riset dengan 10.000 responden tersebut melaporkan, setiap detiknya sebanyak 28.258 pengguna Internet mengakses konten pornografi dan 372 pengguna Internet mengetikkan kata kunci pencarian konten dewasa dalam mesin pencari. Selain itu, setiap detiknya pula, sebanyak kurang lebih US\$ 3000 atau sekitar Rp 27,4 juta dibelanjakan demi mengakses konten pornografi. Dalam hal ini, Amerika Serikat memproduksi lebih dari 244 juta situs porno dan produsen video porno terbesar dunia. Sekedar catatan, omzet industri pornografi di seluruh dunia pada 2006 sebesar US\$ 97 miliar atau sekitar Rp 886 triliun (US\$ 1=Rp 9142).⁹ Belum lagi kebelumsinkronan regulasi sex-shop di masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Propinsi DIY.

PSI UII mengapresiasi, di samping fungsi regulasi yang dijalankan pemerintah, dibutuhkan penguatan skema etis dalam otonomi moral warga. Konteks dan lingkungan belajar masyarakat yang hendak diperkuat adalah pendasaran moral yang pro-keluarga.

Bacaan di atas dapat ditambah dan didiskusikan lebih lanjut sebagai alternatif agenda Forum Pengarusutamaan Gender bagi Ormas Agama.

SUMBANG SARAN

Berikut ini diajukan sejumlah sumbang saran untuk agenda *Musyawaharah* "Pembentukan Forum Pengarusutamaan Gender bagi Ormas Agama:

1. Dalam konteks Propinsi DIY, pembangunan dan pemberdayaan gender niscaya menjadi kepentingan para pemangku kepentingan. Dilihat dari kepentingan pemerintahan, diperlukan penguatan layanan yang berorientasi kepada masyarakat. Yaitu pada *rumusan kebijakan* (penyusunan dan penetapan standarisasi pelayanan minimal), *penataan institusi* (kelembagaan dan peraturan daerah), dan *fasilitasi*. Jika pemenuhan optimal pemerintah eksekutif terletak pada pelaksanaan standar pelayanan minimal, untuk legislatif pada keseimbangan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, maka pada masyarakat adalah penetapan aturan-main (*code of conduct*). Jadi, kepuasan masyarakat (*user*) merupakan harga yang harus dibayar oleh pemerintahan. Siapapun tidak bisa mengklaim dan mengatasnamakan masyarakat, sepanjang tidak berorientasi pada masyarakat itu sendiri, apalagi untuk tujuan dan kepentingan yang lain. Untuk itu, PSI UII berkesimpulan bahwa isu gender

⁸ Jawa Pos (2007), Ekspo Industri Porno Terbesar dan Pameran Elektronik Las Vegas yang Berbonus Pameran Porno, 15 Januari.

⁹ Soal Sex, Indonesia Peringkat Tujuh, dalam <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/03/tgl/28/time/103144/idnews/759716/idkanal/398,28/03/200710:31WIB>, data diunduh 16 Juni 2007.

menjadi masalah kapasitas belajar sosial warga. Artinya, seberapa kemaslahatan program dan kegiatan gender mampu menjawab masalah masyarakat.

2. Revitalisasi KUA (Kantor Urusan Agama) beserta BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) di 78 kecamatan se-DIY. Revitalisasi dimaksud untuk penguatan kapasitas kelembagaan, tugas dan fungsi, serta kebijakan dan strategi terhadap permasalahan masyarakat. PSI UII mengapresiasi rencana Kanwil Depag DIY untuk menerapkan “Program Pendaftaran Nikah lewat Komputer dan aplikasinya,” yang telah mengantar KUA Pleret Bantul sebagai KUA Percontohan Pertama Nasional 2006. Untuk itu, PSI UII mendorong terjadinya harmonisasi program, analisis dampak, dan evaluasi pasca-program antara Pemerintah Propinsi dan Kanwil Depag DIY dalam pembangunan dan pemberdayaan gender di tingkat keluarga, termasuk penguatan program DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah), dalam koridor Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Rencana Straregis Daerah Propinsi DIY Tahun 2004-2008.
3. Tumbuh dan maraknya kelompok-kelompok pengajian (*majelis ta’lim*) di Propinsi DIY sebagai pranata sosial keagamaan merupakan fenomena yang berpotensi sebagai lingkungan dan media belajar warga. Untuk itu, untuk konteks penguatan pemahaman dan sikap keagamaan yang adil dan setara gender, PSI UII mengajak para pemangku kepentingan untuk mengembangkan sumber-sumber belajar jalur pendidikan informal kelompok pengajian dan model yang lain sebagai alternatif program Jogja kota toleransi.